

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DAERAH,
TRANSPARANSI, AKTIVITAS PENGENDALIAN DAN
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)**

Oleh:

Dewi Yuli Angraini

Pembimbing: Restu Agusti dan Lila Anggraini

Faculty of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : dyuliangraini@gmail.com

The effect of the implementation of the financial system, transparency, the activity of control, and the presentation of financial report on accountability in financial management

ABSTRACT

Accountability of a province financial management is a processes of finance started from plan, action, report, responsibility and supervise which can be really reported and been responsible to society and DPRD (Representatives of province). The type of data in the research is quantitative. The population in the research is SKPD in Riau Provincial Government, Indragiri Hilir district. Data those are used are primary data. The method of collecting data by sharing questionnaire. The researcher uses double regression analysis by using t-test. The result of the study showed that the implementation of the financial system, transparency, the activity of control, and the presentation of financial report have a significant affect accountability in financial management. The determination koefisien in this study 60,4% while 39,6% was influenced by other variable.

Keywords: accountability, financial, management, control, and financial report.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu merupakan proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai evaluasi tahun berikutnya.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan, tetapi berhak menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut (Halim, 2007).

Prinsip dalam sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah yang meliputi akuntabilitas, *Value for money*,

kejujuran dalam mengelola keuangan publik, transparansi, dan pengendalian. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. *Value for money* harus dioperasikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat dicapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.

Pengelolaan keuangan daerah juga harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan. Kelemahan pengendalian intern atas pemerintah daerah sebagian besar karena belum memadainya unsur lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian. Kelemahan dalam lingkungan pengendalian terlihat dari kurang dipahaminya tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja serta kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan. Sedangkan, kelemahan atas aktivitas pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan transaksi yang akurat dan tepat waktu, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, dan pendokumentasian yang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian penting. Lemahnya pengendalian intern

tersebut dapat mengakibatkan kerugian daerah.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya daerah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan.

Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordian, 2010). Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Namun dalam kenyataannya, BPK menemukan masih banyak permasalahan pada pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang menunjukkan lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. BPK juga menemukan masih banyak permasalahan pada penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Disamping itu, pemerintah juga belum mampu

menyediakan semua informasi keuangan secara terbuka kepada publik.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik perumusan masalahnya yaitu sebagai berikut : 1) apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD?, 2) apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD?, 3) apakah aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD?, 4) apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD?.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, 2) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, 3) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, 4) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

TELAAH PUSTAKA

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh *agent* yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas

legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi.

Menurut Halim (2007:87) akuntabilitas yang efektif mempunyai beberapa ciri-ciri sebagai berikut : 1) Akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh (dalam arti tanggung jawab terhadap pokok dan fungsi instansi, serta program pembangunan yang dipercayakan kepadanya termasuk pelayanan BUMN/BUMD yang berada dibawah wewenangnyanya). 2) Mencakup aspek yang menyeluruh mengenai aspek integritas keuangan, ekonomis, efisien, dan sesuai prosedur. 3) Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai kinerja maupun unit instansi. 4) Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal, untuk menjamin keabsahan, objektivitas dan ketetapan waktu penyampaian informasi. 5) Adanya penilaian yang efektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu instansi. 6) Adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas.

Sistem Keuangan Daerah

Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Kepmedagri No. 64 Tahun 2013, meliputi : a) Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan *cash basis* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan *accrual basis* untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah. b) Penggolongan dan pengikhtisaran, adanya penjurnalan dan melakukan *posting* ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. c) Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan.

Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan

kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Prinsip ini menekankan kepada 2 aspek yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Aktivitas pengendalian

Mardiasmo (2009) menjelaskan, aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian seharusnya efisien dan efektif, menyajikan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri.

Didalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk lebih akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksana roda pemerintahan diharapkan lebih terbuka dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran atau kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas pengendalian yang nantinya dibuat menjadi laporan hasil evaluasi dari aktivitas pengendalian dan seterusnya mengkomunikasikan kejadian yang relevan, handal, dan tepat waktu.

Penyajian Laporan Keuangan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit pemerintahan pengguna anggaran

yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. SKPD selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (PP No 71 Tahun 2010).

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan keuangan tahunan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan

informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

Hubungan penerapan sistem akuntansi keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Akuntabilitas akan tercapai dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baru sesuai dengan paradigma *good governance*. Sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai substansi usaha-usaha untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dan transparansi melalui pembangunan sistem akuntansi keuangan daerah. Selain itu, PP tersebut juga merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang yang komprehensif dan terpadu (*omnibus regulation*) dari paket reformasi regulasi keuangan negara khususnya mengenai penerapannya di pemerintahan daerah yang mencakup tentang perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan keuangan daerah, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Oleh karena itu, khusus mengenai akuntansi di pemerintahan daerah sistem akuntansi

keuangan daerah merupakan bagian dari akuntabilitas.

H₁ : Penerapan Sistem Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hubungan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Dalam mengelola keuangan Negara, dibutuhkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Aliyah (2012) menyebutkan bahwa transparansi publik berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dimana dengan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan akan dapat meningkatkan akuntabilitas yang efektif. Pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi yang mencakup aspek integritas keuangan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi.

H₂ : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hubungan aktivitas pengendalian dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Maksud dan tujuan pemerintah menetapkan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bahan pendukung laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan adanya sistem pengendalian intern yang efektif maka akan meningkatkan akuntabilitas yang baik. Pengendalian intern merupakan salah satu mekanisme paling penting dalam menghasilkan akuntabilitas dan memungkinkan organisasi untuk memantau dan mengontrol operasi mereka.

H₃ : Aktivitas Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hubungan penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena

semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Sebagai entitas yang menggunakan dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Dengan penyajian laporan keuangan baik dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Laporan keuangan yang dihasilkan dalam peningkatan akuntabilitas publik harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan dikatakan memenuhi standar akuntansi pemerintah apabila laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi karakteristik kualitatif informasi yaitu : relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

H₄ : Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Inhil dengan responden Kepala SKPD dan Kepala Sub. Bagian keuangan SKPD. Jumlah sampel penelitian 60 orang yaitu 30 SKPD yang terdiri dari Sekretariat DPRD, 16 Dinas, 1 Inspektorat, 8 Badan, 4 Kantor. Jenis penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji Kualiditas Data, Uji Asumsi Klasik, Analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis dengan uji t.

Defenisi Operasional

Variabel yang digunakan sebagai variabel dependen adalah Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Instrumen pemahaman atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diadopsi dari penelitian Widyaningsih (2011) indikatornya yaitu: a. Pengungkapan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, b. Pengungkapan perbedaan realisasi anggaran dari tahun ke tahun, c. Penilaian kinerja keuangan dengan efektifitas penggunaan sumber dana, d. Penilaian atas pencapaian tujuan, e. Data keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, f. Netralitas dalam pengungkapan, g. Tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas.

Variabel independennya yaitu Penerapan sistem keuangan daerah, Transparansi, Aktivitas pengendalian, dan Penyajian laporan keuangan.

Sistem Keuangan Daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan pihak ekstern Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan ekonomi (Firmansyah, 2008). Transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Sedangkan *value for money (VFM)* merupakan konsep pengelolaan yang mendasarkan pada

tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo:2006). Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Mardiasmo (2009) menjelaskan, aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Bastian, 2006).

Dalam pengukuran variabel penelitian ini menggunakan skala likert yang terdiri point SS=Sangat Setuju (5), S=Setuju (4), RR=Ragu-Ragu (3), TS=Tidak Setuju (2), STS=Sangat Tidak Setuju (1). Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dilakukan terhadap 54 jawaban responden yang memenuhi kriteria untuk pengolahan data. Rata-rata jawaban responden untuk variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah rata-rata jawaban responden adalah 32.0741 dengan standar deviasi sebesar 4.73785. Sedangkan rata-rata jawaban responden untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebesar 17.1667 dengan standar deviasi 2.72480. Untuk variabel transparansi rata-rata jawaban responden adalah 34.0926 dengan standar deviasi 5.88015, sedangkan rata-rata jawaban responden untuk variabel aktivitas pengendalian adalah 32.4074 dengan standar deviasi 3.79433. Rata-rata jawaban responden untuk variabel penyajian laporan keuangan adalah 23.3889 dengan standar deviasi sebesar 3.89202.

Tabel 1
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Akuntabilitas PKD	32.0741	4.73785	54
SAKD	17.1667	2.72480	54
Transparansi	34.0926	5.88015	54
Aktivitas Pengendalian	32.4074	3.79433	54
Penyajian LK	23.3889	3.89202	54

Sumber : Hasil data olahan

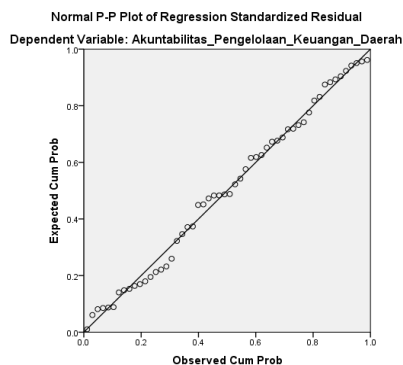
Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{tabel} dengan r_{hitung} . Nilai r_{tabel} pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 54, maka didapat r_{tabel} sebesar 0.273.

Untuk pengujian reliabilitas, jika nilai *cronbach alpha* besar dari

0,6 maka data yang digunakan reliabel, sebaliknya jika nilai alpha lebih rendah dari 0,60 maka nilai tersebut tidak reliabel. Dari hasil olahan data, semua variabel mempunyai nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang digunakan dalam model regresi telah terdistribusi normal.

Gambar 1



Sumber : Data Olahan SPSS

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal, sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari uji Kolmogorov Smirnov.

Tabel 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandar dized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.865499
	Absolute	.073
Most Extreme Differences	Positive	.073
	Negative	-.059
Kolmogorov-Smirnov Z		.535
Asymp. Sig. (2-tailed)		.937

Sumber : Data Olahan SPSS 20

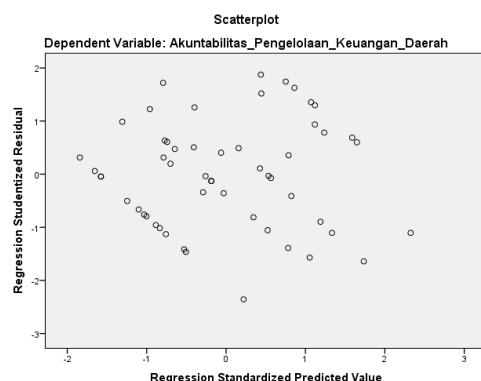
Dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal, karna Signifikan uji Kolmogorov Smirnov $>0,05$ atau $0.937 > 0.05$.

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Hasil perhitungan nilai tolerance bahwa semua nilai *tolerance* berada diatas atau > 0.10 dan nilai VIF dibawah atau < 10 .

Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari pengaruh multikolineritas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain.

Gambar 2



Sumber : Hasil Olahan SPSS 20

Dapat dilihat bahwa diagram pencar yang ada tidak membentuk pola atau acak, maka regresi pada penelitian ini tidak mengalami gangguan heterokedastisitas. Atau dengan kata lain *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu (menyebarkan), maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

Koefisien regresi,

$$Y = -6.112 + 0.375 X_1 + 0.448 X_2 + 0.317 X_3 + 0.265 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

A = Konstanta

b1 , b2, b3 = Koefisien regresi variabel independen

X1 = Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

X2 = Transparansi

X3 = Aktivitas pengendalian

X4 = Penyajian laporan keuangan

e = Standar error

Dari persamaan regresi dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar -6.112 artinya tanpa adanya variabel sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi, aktivitas pengendalian dan penyajian laporan keuangan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan turun sebesar 6.112%.
2. Koefisien regresi untuk variabel X1 sebesar 0,375 artinya jika sistem akuntansi keuangan daerah dinaikkan sebesar 1 % sedangkan variabel yang lain tetap, maka akan menyebabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan naik sebesar 0,375%.
3. Koefisien regresi untuk variabel X2 sebesar 0.448, artinya jika transparansi dinaikkan sebesar 1% sedangkan variabel yang lain tetap, maka akan menyebabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah naik sebesar 0.448%.
4. Koefisien regresi untuk variabel X3 sebesar 0.317, artinya jika aktivitas pengendalian dinaikkan sebesar 1% sedangkan variabel lain tetap, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0.317%.
5. Koefisien regresi untuk variabel X4 sebesar 0.265, artinya jika penyajian laporan keuangan dinaikkan

sebesar 1% sedangkan variabel yang lain tetap, maka akan menyebabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah naik sebesar 0.265%.

Uji koefisien determinan (R^2) digunakan untuk menguji goodness of-fit dari model regresi, yaitu seberapa besar pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 3

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.796 ^a	.634	.604	2.98016

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai dari Adjusted R Square sebesar 0,604, artinya sebesar 60,4% variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebesar 60,4% akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi, aktivitas pengendalian dan penyajian laporan keuangan. Sedangkan sisanya sebesar 39.6% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang digunakan dalam model penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh penerapan sistem keuangan daerah, transparansi, aktivitas pengendalian,

dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Saran

Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian yang ada dalam penelitian ini, saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen yang memungkinkan dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan dapat lebih maksimal dalam memperoleh data kuesioner. Sehingga tingkat pengembalian kuesioner lebih jelas dan dapat dipantau secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Aliyah, Siti dan Aida Nahar. 2012. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan*

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189.

Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Firmansyah, Irman. 2008. Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama*. Bandung.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2006. "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Volume 2 Nomor 1, Universitas Gajah Mada.

———, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, Edisi Kedua.

Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat).
Skripsi. Universitas Negeri
Padang, Padang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 Tentang Perbendaharaan
Negara.

Widyaningsih, A., Triantoro, A.,
Wiyantoro, L.S. 2011.
Hubungan Efektifitas Sistem
Akunntansi Keuangan Daerah
dan Pengendalian Intern
Dengan Kualitas Akuntabilitas
Keuangan: Kualitas Informasi
Laporan Keuangan Sebagai
Variabel Intervening. *Jurnal
Simposium Nasional
Akuntansi XIV Aceh 2011*.

www.inhilkab.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2005. Standar
Akuntansi Pemerintah Basis
Kas menuju Akrua. Sinar
Grafika.

Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah.

PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun
2007 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008. Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah. Nuansa Aulia.

Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010. Standar
Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrua. Fokusmedia.
Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2013
Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.